

## BAB II

### SEJARAH HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DAN RUSIA

#### A. Sejarah Kerjasama Indonesia-Uni Republik Sosialis Soviet 1945-1965

Hubungan kerjasama Indonesia Rusia telah mengalami pasang surut. Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah mendapatkan bantuan dari Rusia. Bantuan yang diberikan tidak dapat dikatakan sederhana, berbagai bantuan mulai dari pengakuan dalam dunia Internasional hingga bantuan dana dalam meningkatkan kemampuan militer sehingga Indonesia menjadi negara yang disegani di kawasan Asia Pasifik.<sup>19</sup>

Kedekatan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Soviet telah dijalin sejak Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Kedekatan antara Indonesia-Uni Soviet mulai membuka pintu hubungan kerjasama antara kedua negara, hal ini merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi Indonesia pada saat itu sedang berjuang setelah merdeka. Rusia pada saat itu bernama Uni Soviet merupakan negara yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi bagian dari anggota PBB.<sup>20</sup> Dukungan yang diberikan Uni Soviet merupakan hal positif karena dengan mendapatkan dukungan dari negara *super power* membuat Indonesia dapat lebih diperhitungkan dalam dunia internasional. Hubungan yang dekat antara kedua negara ini melandasi

---

<sup>19</sup> Kedutaan besar Rusia untuk Indonesia. “Mengenai Sejarah hubungan Rusia-Indonesia”. Diakses 2 Februari 2017, tersedia di [https://indonesia.mid.ru/documents/3046611/9269502/relat\\_4i.pdf](https://indonesia.mid.ru/documents/3046611/9269502/relat_4i.pdf).

<sup>20</sup> Surya, A., 2009, “Antara Indonesia dan Rusia: Sebuah Tinjauan Sejarah” dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm.4.

hubungan kerjasama militer antara Indonesia dengan Uni Soviet.

Hubungan yang dekat antara Indonesia Rusia telah dilakukan sebelum hubungan Diplomatik dibuka tepat pada Februari 1950. Sebelumnya diadakan pertemuan 19 negara Asia pada 19 Desember 1949 bertempat di New Delhi, delegasi Uni Soviet mengajukan tuntutan ke Dewan Keamanan PBB untuk memaksa Belanda membebaskan wilayah yang dikuasainya di Indonesia dan juga segera memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia secara penuh sebelum tanggal 1 Januari 1950. Pemerintah Belanda yang terdesak, terpaksa duduk di meja perundingan dengan wakil-wakil Indonesia, perundingan yang dilakukan di Den Haag pada Agustus 1949 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda tidak menemukan hasil.<sup>21</sup>

Setelah tidak berhasilnya perundingan yang dilakukan di Den Haag dilakukan kembali perundingan yang dilakukan ke Dewan Keamanan PBB. Persetujuan Meja Bundar ditandatangani di Den Haag menjadi akhir konflik diantara Indonesia dan Belanda. Hasilnya pada 27 Desember 1949 diadakannya upacara resmi untuk menerima kedaulatan penuh Republik Indonesia Serikat atas seluruh wilayah Hindia Belanda dengan pengecualian New Guinea Belanda (Irian Barat), dan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki Republik Indonesia Serikat akan dinyatakan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.<sup>22</sup> Perundingan yang berhasil dilakukan tidak terlepas dari campur tangan Uni Soviet yang menekan Belanda untuk segera memberikan kedaulatan Indonesia.

Terjalinnnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet tidak lantas dengan mudahnya membuka kedubesnya di Indonesiakarena terjadi pro dan kontra

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia. Op.Cit.

yag terjadi di dalam negeri. Pada 9 Februari 1953, wakil kepala komisi bidang urusan luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat O.Rondonuwu (kelompok nasionalis), anggota parlemen D.Gondokusumo (Partai Rakyat Nasional), Asraruddin (Partai Buruh), Djokoprawiro (Partai Indonesia Agung), dan M.Ntimihardjo (Partai Murba) mengajukan kepada dewan agar membahas proyek resolusi mengenai pertukaran secepatnya perwakilan diplomatik dengan Uni Soviet.<sup>23</sup>

Pihak yang mendukung pembukaan kedubes Uni Soviet menganggap bahwa pertukaran diplomatik dengan Uni Soviet menjadi penanda bahwa Politik Luar Negeri Indonesia netral dan membuka hubungan dengan pihak manapun dalam dunia internasional. Pembukaan kedutaan Uni Soviet di Indonesia memberi keuntungan untuk dapat memperbesar kesempatan menukar sumber daya alam dari Indonesia, misalnya karet dengan peralatan industri. Sedangkan pihak yang menolak menganggap bahwa dengan membuka dubes Uni Soviet di Indonesia dapat membuka peluang untuk mengulang peristiwa Madiun 1948.

Kunjungan untuk pertama kalinya Presiden Soekarno ke Uni Soviet juga membuka kerjasama bilateral kedua negara. Uni Soviet juga akan menjanjikan kredit jangka panjang ke Indonesia., sementara Indonesia akan memasok bahan mentah dan komoditas lainnya ke Uni Soviet.<sup>24</sup> Perbedaan dan ketegangan ideologi pada saat itu tidak mengurungkan keyakinan Soekarno untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Uni Soviet. Setelah kunjungan ke Moscow tersebut berita-berita terkait kunjungan Presiden Soekarno menjadi disoroti, termasuk dalam majalah internasional terkemuka *Time*,

---

<sup>23</sup> Kedutaan besar Rusia untuk Indonesia. *Op.Cit.*

<sup>24</sup> Kredit jangka panjang merupakan pinjaman sebesar 100 juta US\$. Dilihat dalam Harsono, Kenangan Diplomat Indonesia di Era Sukarno. Hlm.151.

*Newsweek*, dan *Life*. Dalam berita tersebut dibahas mengenai kedekatan “mencurigakan” antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Uni Soviet. Setelah kunjungan tersebut dalam kurun waktu 1957-1958 tidak terlihat adanya kondisi yang memperkuat hubungan Indonesia-Uni Soviet.

Pada tahun 1962-1964 Indonesia yang pada saat itu masih memperjuangkan Irian Barat dibantu oleh Uni Soviet. Pada tahun 1962 Uni Soviet menawarkan bantuan terselubung untuk mendukung perjuangan Indonesia atas Belanda dan mengimbangi supremasi AS di wilayah tersebut. Angkatan Laut Uni Soviet mengirimkan enam kapal selam ke Pangkalan Surabaya. Kemudian kapal selam tersebut dialihkan ke Bitung untuk mendukung tindakan pembebasan Irian Barat.<sup>25</sup> Bantuan yang diberikan kepada Indonesia membuat perlawanan yang berarti untuk Belanda. Indonesia bukan hanya dianggap teman bagi Uni Soviet namun negara potensial yang menjadi aliansi untuk memperkuat dan mendorong mundur AS di kawasan Asia Pasifik. Namun terlepas dari hal tersebut kedekatan kedua negara memberikan keuntungan bagi Indonesia dan Uni Soviet.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru Indonesia mulai memberikan sinyal positif kepada barat yang dianggap dapat menjadi solusi bagi pembangunan Indonesia yang baru saja bangkit dari kemerdekaan. Keadaan berbeda muncul pasca terjadinya peristiwa 1965, jika pada masa Presiden Soekarno Indonesia menjalin kerjasama yang erat dengan Uni Soviet. Pada masa presiden Soeharto Indonesia lebih memilih membangun kerjasama pertahanan dengan pihak barat.

---

<sup>25</sup> Laksamana Sudomo, 1997, *Mengatasi Gelombang Kehidupan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.134.

## **B. Sejarah Kerjasama Indonesia-Uni Republik Sosialis Soviet 1966-1999**

Pada periode 1966-1999 menjadi saksi bahwa hubungan antara Indonesia dan Uni Soviet memburuk akibat peristiwa G30S/PKI, memburuknya hubungan tersebut membuat suplai persenjataan Indonesia yang masih bergantung pada Uni Soviet harus mencari kerjasama baru untuk memenuhi kebutuhan persenjataan.

Melihat kondisi tersebut Indonesia mencari alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan persenjataannya dan memilih untuk melakukan kerjasama dengan pihak barat seperti halnya Amerika Serikat, Prancis dan Inggris yang merupakan negara yang sudah unggul dalam bidang alutsista. Kerjasama dengan pihak barat tersebut diharapkan dapat mempunyai peluang mendapatkan persenjataan yang tidak kalah dengan yang dikirimkan oleh Uni Soviet. Selama kurun waktu tiga puluh tahun Indonesia sama sekali tidak pernah menjalin hubungan kerjasama dengan Uni Soviet dan terus bergantung pada pengiriman alutsista dari pihak barat.

Berakhirnya perang dingin menjadi pertanda mulai mencairnya keadaan politik antara Blok Barat dan Timur. Hal tersebut juga menjadi saksi runtuhnya Uni Soviet. Mulai mencairnya keadaan politik tersebut berdampak pada hubungan Indonesia –Uni Soviet. Dimana untuk pertama kali setelah terpilihnya menjadi presiden, Soeharto melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet dan bertemu dengan Mikhail Gorbachev pada 28 Desember 1991, Indonesia secara resmi mengakui Federasi Rusia sebagai negara yang meneruskan Uni Soviet.<sup>26</sup> Kebijakan tersebut mulai memperbaiki hubungan antara Indonesia-Rusia yang sempat terputus.

---

<sup>26</sup> Mayjen (Purn) S. Kiribiantoro dan Drs. Dody Rudianto, MM. *Op.Cit* hlm.115.

Pada Mei 1998 turunnya pemerintahan Soeharto yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden B.J.Habibie juga sedikit membuat arah kebijakan luar negeri Indonesian berubah. Jika pada masa Soeharto kebijakan luar negeri Indonesia lebih dominan untuk berupaya mendekati diri dengan negara-negara yang perekonomiannya sudah maju untuk mendapatkan utang luar negeri, di era Habibie kebijakan luar negeri Indonesia terfokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di Timor Timur. Pada masa Presiden Habibie yang singkat ini sempat menerima kunjungan Menlu Rusia, Yuri Maslyukov di Jakarta pada bulan Maret 1999. Dalam kunjungan Menlu Rusia tersebut ditandatangani persetujuan perdagangan, persetujuan kerjasama teknik dan ekonomi, dan persetujuan penghindaran pajak berganda.<sup>27</sup>

Perpindahan kekuasaan sejak B.J. Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid ditahun 1999 tidak membuat signifikan hubungan kerjasama antara Indonesia-Rusia. Presiden Abdurrahman Wahid sempat mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin sewaktu menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium PPB di New York tanggal 7 September 2000. Namun tidak ada pembicaraan yang menjurus pada peningkatan hubungan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Rusia.

### **C. Sejarah Kerjasama Indonesia-Rusia 2000-2009**

Pada masa pemerintahan Megawati kebijakan Indonesia sudah terlihat mulai mendekati kembali Rusia. Terbukti saat Megawati secara resmi melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia pada April 2003. Kunjungan ini Indonesia dan Rusia sepakat menandatangani deklarasi hubungan persahabatan dan kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia

---

<sup>27</sup>*ibid.* hlm.115.

pada abad ke-21. Deklarasi ini juga membahas sejumlah kesepakatan seperti kerjasama teknik militer, perbankan, dan teknologi ruang angkasa. Selain itu kedua negara sedang mempersiapkan kerjasama nuklir untuk maksud damai.

Presiden Megawati saat itu juga membeli dua pesawat Sukhoi Su-27SK, dua pesawat tempur Sukhoi Su-30MK, dan dua helikopter tempur MI-35 dengan sistem imbal dagang seperti minyak kelapa sawit mentah dan karet dengan total imbal dagang kurang lebih AS\$ 175 juta.<sup>28</sup> Pembelian ini muncul dikarenakan masalah kebutuhan modernisasi alutsista Indonesia yang mendapatkan embargo senjata dari Amerika Serikat karena Indonesia dianggap melakukan Hak Asasi Manusia. Upaya Presiden Megawati menjalin kerjasama antara Indonesia-Rusia dianggap berhasil, dan menjadi dasar pengembangan kerjasama teknik militer yang dapat diperluas untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kekuatan militer demi menjaga keamanan negaranya.

Beralihnya pemerintahan Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono, sama sekali tidak memudahkan kerjasama yang telah terjalin. Pada November 2006 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke Rusia juga menandatangani dokumen kesepakatan mengenai kerjasama melawan terorisme oleh pemerintah kedua negara tersebut. Rusia juga sepakat untuk melakukan penjualan senjata dan alat pertahanan kepada Indonesia.

Bukan hanya sampai sebatas hal itu, Rusia memberikan pinjaman state credit 1 miliar dollar AS sebagai pengadaan persenjataan Indonesia untuk tahun 2006-2009.<sup>29</sup> Pinjaman ini digunakan Departemen

---

<sup>28</sup> Lekbang, T. (2010). *Sahabat Lama Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia*, Grasindo, Jakarta, hlm.47.

<sup>29</sup> Faradisah, N.R, 2012, "Kerjasama Indonesia dengan Rusia dalam Bidang Pertahanan Militer pada Masa Pemerintahan

Pertahanan RI untuk melakukan peningkatan kemampuan pertahanan negara dan pengadaan 10 Helikopter MI-17-V5 dan 5 Helikopter MI-35P beserta persenjataannya bagi TNI AD untuk kebutuhan helikopter serbu dan transportasi; 2 kapal selam kelas kilo dan 20 kendaraan infanteri tempur BMP-3F untuk TNI AL sedangkan TNI AU yang menjadi prioritas akan dilengkapi satu skadron pesawat tempur Sukhoi yang terdiri dari 3 unit Sukhoi SU-27 dan 3 unit Sukhoi SU-30, serta 6 paket peralatan avionik dan persenjataan Sukhoi TNI AU.<sup>30</sup>

Setahun setelah kunjungan SBY ke Rusia kini giliran Presiden Vladimir Putin yang melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan September 2007, dalam kunjungannya Presiden Putin memberikan peluang kerja sama yang lebih luas serta dukungan kemajuan ekonomi dan politik kedua negara yang membaik setiap tahunnya. Rusia menawarkan peluang yang baik dalam meningkatkan kapabilitas militer Indonesia yang membutuhkan peningkatan alutsista dalam menjaga kedaulatan.

Adapun perjanjian internasional di bidang militer pada masa pemerintahan SBY pada kurun waktu 2004-2009:<sup>31</sup>

1. *Minutes of Meeting Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation to Promote Bilateral Cooperation in defense and Security.* (Catatan Pertemuan Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Peningkatan Kerjasama Bilateral di Bidang Pertahanan dan Keamanan) Jakarta, 17 September 2004).

---

Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009” dalam *Jurnal Transnasional*, vol.3, no.2, hlm. 11.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Departemen Luar Negeri RI, “Daftar Perjanjian Internasional Rusia-Indonesia”, diakses dari : [www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id). Pada tanggal 5 maret 2017.



2. *Memorandum of Understanding Between Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Assistance in Implementation of the Program of the Indonesia-Russian Military-technical Cooperation for 2006-2010.* (Memorandum Saling pengertian antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Federasi Rusia mengenai bantuan dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik-militer Indonesia-Rusia tahun 2006-2010) Moscow, 1 Desember 2006.
3. *Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Rights of the Results of Intellectual Activity Applied and Obtained in the Course of Bilateral Military-technical Cooperation.* (Persetujuan antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah Federasi Rusia mengenai perlindungan timbal balik atas hak-hak hasil aktivitas intelektual yang diterapkan dan diperoleh dalam rangka kerjasama bilateral teknik militer ) Moscow, 1 Desember 2006.

#### **D. Sejarah Kerjasama Indonesia-Rusia 2010-2013**

Pada tanggal 27 September, 2010 di Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Bpk. Alexander A. Ivanov mengikutserta dalam upacara penyerah-terimaan tiga pesawat tempur serbaguna "Sukhoi" Su-27 SKM buatan Rusia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pesawat-pesawat tempur dipasok ke Indonesia dengan menggunakan pesawat angkutan "Antonov" AN-124-100 dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 10 September, 2010 dan pada tanggal 16 September, 2010. Dengan tiga pesawat tempur ini Rusia memenuhi kontrak tahun 2007 untuk menyediakan enam

pesawat tempur kepada TNI. Ketiga pesawat yang lain, yaitu Su-30 MK2 telah diserahkan kepada pihak Indonesia pada tanggal 2 Oktober, 2009.

Dari pihak Indonesia secara resmi pesawat tempur itu diterima oleh Bpk. Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Marsekal Imam Sufaat, Kepala Staff TNI AU. Yang juga hadir dalam upacara tersebut yaitu Athan Kedubes Rusia Kolonel Vladimir F. Afanasev, wakil-wakil Korporasi Negara "Teknologi Rusia", Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI AU, persatuan TNI yang bermarkas di Makassar dan para wartawan.

Dalam beberapa tahun yang lalu kita berhasil menjalin hubungan saling percaya dalam bidang kerjasama teknik-militer dan menyepakati program kerja untuk jangka waktu panjang. Semua transaksi jual-beli ini didasarkan hanya pada pendekatan perdagangan. Pemerintah Rusia siap menyediakan Indonesia dengan jenis senjata dan perlengkapan militer yang paling modern tanpa syarat-syarat sebelumnya apa pun" tutur Duta Besar Ivanov pada pertemuan pers sesudah upacara penyerah-terimaan itu.

Menteri Pertahanan Bpk. Purnomo Yusgiantoro menyatakan rasa terima kasih kepada pihak Rusia atas merakit pesawat tempur modern ini terlebih dulu dari jadwalnya. Pesawat tempur "Sukhoi" jenis Su-27 SKM mempunyai sistem navigasi terbaru dan peralatan display multifungsional yang membantu pilotnya untuk lebih mudah memaanuver pesawat. Setelah tiba di Makassar, pesawat-pesawat Rusia itu dirakit dan diuji coba, dan sekarang pesawat-pesawat itu siap untuk digunakan. Ketiga pesawat tempur "Sukhoi" itu akan ikut dalam Skadron XI yang bermarkas di Lanud Sultan Hasanuddin. Pesawat tempur buatan Rusia "Sukhoi" itu akan ikut serta dalam Air Show Perayaan HUT TNI pada tanggal 5 Oktober, 2010.

Pada tanggal 11 Mei 2012 di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia wakil-wakil Rusia dan Indonesia menandatangani kontrak pembelian 37 kendaraan tempur infanteri BMP-3F buatan Rusia yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Laut Republik Indonesia (TNIAL). Kontrak ini ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Mayor Jenderal Ediwan Prabowo dan Wakil Perusahaan OJSC "Rosoboronexport" di Indonesia Vadim Varaksin.

Pembiayaan kontrak senilai 114 juta dolar AS ini akan dilakukan dengan menggunakan dana pinjaman negara yang diberikan kepada Indonesia oleh Rusia sesuai dengan perjanjian antarpemerintah yang ditandatangani pada bulan September 2007. Ini adalah kontrak pasokan BMP-3F buatan Rusia ke Indonesia yang kedua. Bagian pertama yang terdiri dari 17 kendaraan diserahkan kepada TNIAL pada bulan Desember 2010 dan sekarang sudah dieksploitasi dengan sukses oleh TNI Republik Indonesia. Sesuai penandatanganan kontrak ini Ediwan Prabowo dan Vadim Varaksin dalam pidatonya menyatakan kepuasan atas perkembangan kerjasama antara Rusia dan Indonesia di bidang militer teknik.

Pada tahun 2011 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Penggunaan Energi Atom untuk Maksud Damai mulai berlaku. Pada tahun 2012 perusahaan "Sukhoi Civil Aircraft" dan "Kartika Airlines" telah menandatangani kontrak pembelian 30 pesawat Sukhoi Superjet 100 senilai 950 juta dolar AS. "Sky Aviation" telah menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat lagi senilai 379 juta dolar AS. Kedua pihak juga mengembangkan kerja sama di bidang teknik militer. Persetujuan antara Pemerintah Rusia dan Pemerintah Indonesia tentang kerja sama teknik militer mulai berlaku pada bulan Mei 2012. Pada tahun 2008

pihak Rusia memberi kepada pihak Indonesia kredit negara sebesar satu milyar dolar AS untuk pembelian peralatan militer buatan Rusia. Dalam rangka kerja sama teknik militer Rusia memasok pesawat-pesawat tempur "Su", helikopter-helikopter, kendaraan tempur lapis baja dan peralatan militer yang lain untuk Angkatan Bersenjata Indonesia.

Pada tanggal 22 Februari 2013 diadakan pasokan dua pesawat Sukhoi SU-30MK2 pertama dan perlengkapannya ke Pangkalan AU Indonesia Hasanuddin (Makassar, Sulawesi Selatan) dalam rangka kontrak yang ditandatangani JSC "Rosoboronexport" dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 29 Desember 2012. Saat ini ahli-ahli Rusia sudah memulai pekerjaan perakitan pesawat-pesawat. Pasokan kedua dan ketiga pesawat-pesawat Sukhoi sesuai dengan kontrak tersebut dijadwalkan akan dirampungkan sebelum Juli 2013. JSC "Rosoboronexport" merupakan bagian dari korporasi milik negara "Rostekhnologii" dan adalah satu-satunya perantara resmi di Federasi Rusia yang mengespor dan mengimpor produksi, jasa-jasa dan teknologi pertahanan dan dwiguna.

Pada tanggal 25 September 2013 diadakan acara resmi serah terima dua pesawat tempur SU-30MK2 buatan Rusia kepada Angkatan Udara Republik Indonesia yang diselenggarakan di Pangkalan AU Republik Indonesia Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh Duta Besar Federasi Rusia di Republik Indonesia Mikhail Y. Galuzin, Menteri Pertahanan Republik Indonesia P. Yusgiantoro, para komandan AD, AU dan AL, perwakilan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Staf Angkatan Udara, ahli-ahli bertanggung jawab dari

Kedutaan Besar dan kantor perwakilan SC " Russian Technologies " di Indonesia.<sup>32</sup>

## **E. Kerjasama Indonesia-Rusia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2018)**

### **1. Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia**

Jika melihat kondisi alutsista yang ada saat ini, masih banyak peralatan militer yang berusia sangat tua, jumlahnya terbatas, teknologinya juga ketinggalan zaman, juga diperparah dengan kualitas profesionalisme dan kesejahteraan prajurit yang tergolong masih rendah serta ketergantungan pada produk negara lain. Kondisi tersebut menyebabkan kekuatan pertahanan negara di bawah kekuatan pertahanan minimal. Teknologi pertahanan di Indonesia sampai saat ini relatif masih tertinggal dibandingkan dengan negara maju, hal ini juga disebabkan sistem pertahanan di Indonesia kurang reaktif apabila tidak ada ancaman yang nyata.

Meski kondisi kemanan dalam negeri dan regional di Indonesia relatif stabil, namun modernisasi peralatan tempur dan pertahanan harus tetap dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Namun, pemerintah sendiri mempunyai masalah, yaitu minimnya anggaran apabila ompor peralatan tempur dari luar negeri. Sementara itu, di saat Indonesia sedang berpikir tentang anggaran, tetangga dekat Indonesia yaitu Malaysia dan Singapura mampu meloncat lebih jauh dalam modernisasi peralatan tempur. Sebagai contoh untuk modernisasi mobile battle tank, kini Malaysia mempunyai 48 unit tank PT – 91 dari Polandia, tank jenis ini mempunyai senjata kanon 2A46MS kaliber 125 mm. Adapun Singapura

---

<sup>32</sup> Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk Indonesia, *Mengenai Pasokan Dua Pesawat Pertama Sukhoi SU 30mk*, Dikutip dari [https://indonesia.mid.ru/web/indonesia\\_ind/-/mengenai-pasokan-dua-pesawat-pertama-sukhoi-su-30mk2-ke-indonesia](https://indonesia.mid.ru/web/indonesia_ind/-/mengenai-pasokan-dua-pesawat-pertama-sukhoi-su-30mk2-ke-indonesia).

lebih jauh lagi, kini memiliki 96 tank leopard buatan Jerman, yang kemampuan tempurnya dapat disejajarkan dengan MBT M1A2 Abrams buatan Amerika Serikat. Indonesia sendiri belum pernah merasakan kendaraan tempur dengan senjata di atas kaliber 105 mm, dengan kata lain di Indonesia masih berkutat dengan tank ringan

Meskipun demikian, Indonesia sebenarnya juga mencoba melakukan loncatan teknologi semampunya, hal ini bisa dilihat dengan pengadaan beberapa panser buatan Pindad serta banyanya penelitian lainnya yang dilakukan oleh lembaga litbang dan universitas nasional.<sup>33</sup>

#### 1. Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri merupakan kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain dalam lingkup dunia internasional. Dengan demikian, politik luar negeri tentu saja berbeda antara negara satu dengan negara lainnya tergantung pada tujuan nasional masing-masing negara.

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif, artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan internasional. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, negara Indonesia berhak menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan demikian, negara Indonesia tidak dapat dipengaruhi kebijakan politik luar negeri negara lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> LIPI, *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan Dan Keamanan Republik Indonesia*, diterbitkan LIPI Press, anggota Ikapi 2012.

<sup>34</sup> "Politik bebas aktif Indonesia". Diakses dari: [www.tempo.com](http://www.tempo.com).

Kebijakan politik luar negeri Indonesia akan menentukan kualitas hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan diplomasi. Dimana kegiatan diplomasi ini penting untuk dilakukan oleh Indonesia mengingat kepentingan nasional dalam negeri yang semakin bertambah mengikuti perkembangan zaman. Politik luar negeri juga sebagai bentuk siasat sebuah negara untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain agar tercapainya kebijakan luar negeri sesuai kepentingan nasional negara tersebut.<sup>35</sup>

Politik luar negeri sebuah negara dapat berubah-ubah sepanjang masa pemerintahan presiden atau kepala negara yang sedang memerintah di negara tersebut. Tak terkecuali politik luar negeri Indonesia, yang selalu berubah sejak masa pemerintahan Soeharto hingga presiden Joko Widodo. Saat ini Indonesia di pimpin oleh Presiden Joko Widodo bertekad menjadikan Indonesia negara maju, kompetitif, dan memiliki mentalitas baru.

Seperti dirumuskan dalam Renstra Kemenlu 2015-2019. Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri RI akan dititikberatkan pada mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional, menguatkan diplomasi middle power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik.<sup>36</sup>

Pada dasarnya dinamika politik internasional yang diwarisi Presiden Joko Widodo tidak berbeda

---

<sup>35</sup> Rudi Hartono, "Menilai Politik Luar Negeri Indonesia", diakses dari: [www.lmnd-online.org](http://www.lmnd-online.org) pada tanggal 31 maret 2017.

<sup>36</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, "*Rencana Strategis 2015-2019*", file:///D:/Rencana%20Strategis%20Kemlu%202015-2019.

dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini menjadi argumentasi kedua mengapa Jokowi akan cenderung menguatkan penguatan nasional. Kekuatan-kekuatan internasional masih akan tetap berada di tangan AS, Uni Eropa, bersama dengan organisasi-organisasi Internasional seperti PBB, UE/NATO, IMF/WB, WTO dan lainnya. Lembaga-lembaga semacam ini tetap tidak terpisah dari AS dan UE karena menjadi instrumen penting bagi legitimasi maupun penguatan dan perluasan peran negara-negara besar tersebut.<sup>37</sup>

Dalam Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia Indonesia berhasil meraih transaksi bisnis dengan Rusia sebesar 50 juta dollar AS dari sawit dan kopi, Kopi Kapal Api sebanyak 25 kontainer senilai 850.000 dollar AS dan kopi roasting dari Malang sebanyak 12 kontainer dengan nilai 1,2 juta dollar AS per tahun. Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personel TNI/Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia. Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik.<sup>38</sup>

## 2. Faktor-Faktor dalam Kebijakan Politik Luar Negeri

William D Coplin mengelompokkan kedalam tiga hal yang berkaitan dengan factor psikologis yaitu penetapan situasi, pemilihan tujuan, pencaharian alternative dan pemilihan alternatif.

### a. Penetapan Situasi (*Defening Situation*)

Berkaitan dengan konsep citra ( image ) untuk

---

<sup>37</sup> Tabloid Diplomasi No.72 Tahun VII, hlm. 4, <http://www.tabloiddiplomasi.org>.

<sup>38</sup> Febian Januarius Kuwado, Kompas.com “ *Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun Apa Saja Pencapaiannya*”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/17563621/politik-luar-negeri-jokowi-jk-dalam-4-tahun-apa-saja-pencapaiannya?page=all>.



menganalisis variabel psikologis serta pengalaman-pengalaman pribadi ( *personal experience* ). Salah satu ciri citra yang sangat mempengaruhi cara seseorang menetapkan lingkungannya yang pada akhirnya mempengaruhi orang tersebut untuk berperilaku. Bisa juga dikatakan sebagai rangkaian yang disebut sebagai citra terbuka dan citra tertutup.

b. Pemilihan Tujuan ( *Selecting Goals* )

Pemilihan tujuan berdasarkan suatu anggapan bahwa pembuatan keputusan adalah merupakan suatu proses intelektual rasional, maka tujuannya yang secara eksplisit dan hirarkis dapat dirumuskan sebagai peluang yang diberikan oleh lingkungan. Meskipun lingkungan ( internasional ) akan mempersulit pembuatan pernyataan yang tegas dan jelas dan penyusunan tujuan-tujuan, pembuatan keputusan atau kebijaksanaan politik luar negeri yang rasional dan berupaya melakukannya secara maksimal. Jadi kecenderungan seorang pemimpin politik untuk memelihara dan memperbaiki posisi politiknya ( dalam negerinya ) akan membawa konsekuensi yang jelas dalam penetapan tujuan politik luar negeri. Kebutuhan para pembuat keputusan politik luar negeri akan kekuasaan dan prestasi memang mempengaruhi penekanan akan ancaman terhadap keamanan nasional yang sering dibuat oleh para pemimpin dari berbagai negara.

## 2. Kerjasama Indonesia-Rusia

Di era Presiden Joko Widodo, kebijakan Renstra terus dilanjutkan. Renstra tahap dua dimulai

tahun 2014 atau sejak Presiden Jokowi menjabat menjadi presiden. Ada tiga fokus kebijakan Renstra tahap kedua yaitu pertama, meningkatkan profesionalisme personel, kedua, memodernisasi alutsista atau non-alutsista atau sarana dan prasarana matra udara, dan yang terakhir adalah pengamanan wilayah pbatasan dan pulau terdepan dan terluar. Kebijakan lainnya yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista.

Pada September lalu, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli satu skuadron Su-35 milik Rusia secara bertahap demi menggantikan pesawat tempur F-5 Tiger milik Amerika. Sepertinya, Indonesia akan mendapat pinjaman lunak senilai tiga miliar dolar AS atas pembelanjaan ini. Selain itu, Kementerian Pertahanan Indonesia juga berencana membeli lima kapal selam Rusia. Sebelumnya, pihak Indonesia telah melakukan negosiasi dengan pihak Rusia mengenai pembelian kapal selam bekas proyek 877 Paltus, tetapi kemudian pihak Indonesia mengumumkan pembatalan kesepakatan ini dan memilih untuk membeli kapal selam bertenaga diesel terbaru Amur-1650. Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa kapal selam bertenaga diesel milik Rusia memiliki karakteristik terbaik.

Menurut Perwakilan Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunia (TsAMTO), kemungkinan Indonesia juga tertarik untuk membeli sistem pertahanan udara jarak menengah. Pemberian kredit tersebut kepada pihak Indonesia akan mempermudah senjata Rusia masuk ke pasar Indonesia. Rusia dan Indonesia memiliki pengalaman positif dalam kejasama di bidang militer. Sejak tahun 2000, TNI menerima beberapa modifikasi jet tempur

Su, helikopter Mi-17-IV dan Mi-35M, BTR-80A, BMP-3F, dan senjata AK-101 serta AK-102.<sup>39</sup>

Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI menyampaikan keinginannya untuk mendalami kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) dengan Rusia, hal ini disampaikan langsung kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral Indonesia Rusia di Bucherov Rucey, rumah kediaman Presiden Putin di Sochi, Rusia pada Rabu (18/5/2016).

Presiden Jokowi ingin meningkatkan kerjasamanya di bidang Hankam dan tidak hanya berpatokan pada pengadaan alutsista, namun juga ditingkatkan dalam bentuk pusat layanan pemeliharaan dan perbaikan alutsista di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mengharapkan peningkatan kerjasama tersebut lebih luas cakupannya hingga bidang alih teknologi seperti melakukan produksi bersama. Bidang pendidikan dan pelatihan militer juga tak luput dalam daftar Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap Indonesia bisa melakukan kerjasama pendidikan, pelatihan dan pertukaran perwira siswa dengan Rusia. Kedua Presiden juga sepakat meningkatkan kerjasama dalam hal pemberantasan terorisme dengan cara bertukar data intelijen.<sup>40</sup>

Presiden Jokowi mengatakan pengadaan alutsista harus berdasarkan kebutuhan Tentara Indonesia bukan berdasarkan keinginan semata.

---

<sup>39</sup>RBTH INDONESIA, *Tiga Bidang yang Memperkuat Kerja Sama Rusia-Indonesia*, [https://id.rbth.com/economics/2015/10/20/tiga-bidang-yang-memperkuat-kerja-sama-rusia-indonesia\\_484557](https://id.rbth.com/economics/2015/10/20/tiga-bidang-yang-memperkuat-kerja-sama-rusia-indonesia_484557) diakses pada 20 September 2015.

<sup>40</sup> Rima Suliastini, *Indonesia-Rusia*. Diakses dari <https://tirto.id/jokowi-tidak-bahas-sukhoi-di-rusia-86Q> pada tanggal 20 Mei 2016.

Ketika pengadaan alutsista diadakan, maka Menteri Pertahanan akan menerima masukan dari semua matra, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, sehingga alutsista yang nanti dibeli benar-benar terencana dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh TNI. Menurut Presiden Jokowi, setiap pembelian alutsista harus ada transparansi kepada publik dan menerapkan UU industri pertahanan seperti harus adanya alih teknologi dari negara produksi terhadap industri pertahanan nasional di masa depan.<sup>41</sup>

Presiden Jokowi mengatakan perlu adanya terobosan terbaru untuk mengubah pola belanja alutsista agar menjadi investasi pertahanan di masa akan datang. Kementerian Pertahanan harus mengkalkulasi setiap pembelanjaan alutsista mana yang akan memberikan keuntungan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional maupun kepentingan nasional.<sup>42</sup> Kementerian pertahanan juga harus mengoptimalkan setiap pengadaan alutsista agar tercapainya kemandirian industri pertahanan nasional dan produksi bersama yang memungkinkan hak cipta alutsista dimiliki industri pertahanan nasional serta relokasi fasilitas produksi dari negara produsen ke Indonesia. Syarat pengadaan alutsista lainnya adalah proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar pemerintah atau G to G untuk

---

<sup>41</sup> Fakhri Fakhri, *Jokowi: Saya Ingin Pengadaan Alutsista Transparan, Jangan Dikorupsi!*, Okezone, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/07/26/337/1744403/jokowi-saya-ingin-pengadaan-alutsista-transparan-jangan-dikorupsi>, pada tanggal 5 Februari 2018.

<sup>42</sup> Joko Susilo, *Presiden Jokowi: Ubah Pola Belanja Alutsista Jadi Investasi*, Antara, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/574142/presiden-jokowi-ubah-pola-belanja-alutsista-jadi-investasi>, pada tanggal 10 Januari 2018.

mengurangi harga transaksi yang biasanya membengkak karena adanya perantara. Dalam pengadaan alutsista harus diterapkan prinsip transparansi biaya pembelian sehingga tidak ada lagi korupsi yang terjadi. Karena alutsista dibeli dari uang rakyat, Presiden Jokowi memperingatkan agar alutsista dapat digunakan dalam melindungi rakyat, negara dan bangsa dari segala bentuk ancaman yang ada.<sup>43</sup>

Presiden Jokowi menegaskan agar setiap pembelian alutsista harus benar-benar yang baru bukan merupakan bekas pakai atau hasil hibah. Kualitas pesawat baru tentu berbeda dengan pesawat hasil hibah maupun bekas pakai. Berbagai kecelakaan pesawat terjadi karena kesalahan teknis atau buruknya kualitas mesin yang ada. Salah satunya yaitu jatuhnya pesawat Hercules di Papua pada tahun 2016, padahal pesawat tersebut kurang dari setahun bergabung dengan TNI AU Indonesia. Pesawat tersebut merupakan hibah dari Angkatan Udara Australia atau *Royal Australian Air Force*(RAAF).<sup>44</sup>

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Y. Galuzin mengatakan, negaranya sangat terbuka untuk dialog dengan Indonesia soal kerjasama militer dan pertahanan, termasuk pembelian senjata. Menurut diplomat Moskow ini, Indonesia tertarik dengan

---

<sup>43</sup> Fabian Kuwado, *Ditawari Alutsista dari Negara Asing, Jokowi Ingatkan Indonesia Harus Tetap Mandiri*, Kompas, diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/16560481/ditawari-alutsista-dari-negara-asing-jokowi-ingatkan-indonesia-harus-tetap-mandiri>, pada tanggal 10 Februari 2018.

<sup>44</sup> Andi Hartik, *Pesawat Hercules TNI AU Yang Jatuh di Papua Hibah Dari Australia*, Kompas, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2016/12/18/15321811/pesawat.hercules.tni.au.yang.jatuh.di.papua.hibah.dari.austar>, pada tanggal 10 Februari 2018.

senjata buatan Rusia. “ Ini sudah dijelaskan pejabat Indonesia, bahwa Indonesia tertarik senjata buatan Rusia. Kami siap dialog dengan pemerintah Indonesia terkait hal ini. Segera setelah ada hasil konkret, kami akan jelaskan lebih rinci lagi,” katanya, pada hari Senin (27/2/2017), di kediamannya, di Jakarta Selatan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui, barter atau pertukaran barang dagangan diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2012 tentang industri Pertahanan. Namun, dia belum bisa memastikan komoditas apa yang bakal dijadikan obyek pertukaran. “Setiap beli alutsista maka ada rumusannya itu. Kementerian pertahanan beli Sukhoi dan sebagian dari itu ada imbal dagangnya,” katanya. Pemerintah, lanjutnya, telah menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk menjadi pelaksana barter. Sementara Rusia telah menunjuk Rostec.

Dalam kesempatan sama, Jaksa Agung H.M Prasetyo menyatakan siap melakukan pendampingan. “Kejaksaan punya kapasitas untuk beri legal opinion. Kita berharap akan terhindar kemungkinan terjadinya kelemahan yang nantinya merugikan kita semua,” kata Prasetyo. “Ketika kita kontrak dengan negara asing, kita ada di posisi di bawah karena kontraknya ada kesalahan. Diharapkan tidak terjadi lagi dan negara tidak mengalami kerugian.”<sup>45</sup>

Menurutnya, kerjasama teknis antara Rusia dan Indonesia, khususnya dalam bidang militer sudah sangat baik. Meski demikian, Rusia siap untuk menjalin pembicaraan lebih lanjut dengan Indonesia tentang kerjasama ini. “saya ingin konfirmasi soal kerjasama teknis antara Rusia dan Indonesia. Rusia

---

<sup>45</sup> Yuyu Agustini Rahayu, *Kemendag Gandeng Kejagung Kaji Peluang Barter Sukhoi dengan Karet*, <https://www.merdeka.com/uang/kemendag-gandeng-kejagung-kaji-peluang-barter-sukhoi-dengan-karet.html> diakses pada Mei 2017.

siap melakukan kerjasama yang lebih kuat lagi, khususnya di area yang lebih teknis seperti pertahanan dan militer,” imbuhnya. Kerjasama bilateral kedua negara, sambung Galuzin, juga sangat positif. Dia mencontohkan, pada akhir tahun 2014 lalu Indonesia telah menerima pesawat jet tempur Su-30. Rusia juga telah merampungkan pengiriman kendaraan tempur kepada Angkatan Laut Indonesia. “Kami berharap ada perkembangan baru terkait kerjasama bilateral ini, “katanya.<sup>46</sup>

Galuzin juga meyakinkan bahwa Indonesia memilih partner yang tepat dalam upaya memajukan sistem pertahanan negaranya. Sebab, Rusia dikenal sebagai negara dengan perlengkapan militer yang mumpuni. “Rusia sangat bisa diandalkan dan menjanjikan jika itu menyangkut dari segi militer dan operasi teknis. Kami yakin Indonesia akan memiliki sistem pertahanan yang baik jika bekerjasama dengan kami,” ungkapnya. Adapun kesepakatan yang saat ini dijalani kedua negara adalah barter pengadaan alat pertahanan kamanan yakni 11 pesawat tempur Sukhoi dengan komoditas ekspor dari Indonesia antara lain minyak, kelapa sawit, kopi hingga karet.<sup>47</sup>

Rencana Indonesia mendatangkan pesawat tempur generasi 4, Sukhoi SU-35 dari Rusia tinggal selangkah lagi. Menteri pertahanan (Menhan) RI, Ryamizard Ryacudu menjelaskan bahwa bulan November mendatang pemerintah akan melakukan tanda tangan pembelian 11 pesawat Sukhoi SU-35 buatan Rusia. “Nanti November tanda tangan,

---

<sup>46</sup> Victor Maulana, *Moskow: Indonesia Tertarik Senjata Rusia, Kami Siap Dialog*. <https://Internasional.sindonews.com> Diakses pada Senin 27 Februari 2017.

<sup>47</sup> Ira Astiana, *Rusia Yakinkan Indonesia Kerjasama Militer Akan Menguntungkan*, <https://www.merdeka.com/dunia/rusia-yakinkan-indonesia-kerja-sama-militer-akan-menguntungkan.html> diakses pada Rabu 23/8/2017.

orangnya dari perusahaan Sukhoi akan ke sini,” kata Ryamizard usai rapat di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).

Pesawat Sukhoi SU-35 ini merupakan pesawat tempur multiperan, kelas berat, berjelajah panjang, dan bertempat duduk tunggal. Pesawat ini awalnya diberi nama SU-27M dan dikembangkan dari Sukhoi SU-27. Pesawat Sukhoi SU-35 dikembangkan untuk menandingi F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon.

Ryamizard menjelaskan bahwa pemerintah membeli Sukhoi SU-35, dimana harga satu untungnya dibandrol USD90 juta. Harga tersebut termasuk amunisi dan segala sistem avionik yang canggih menggunakan metode pembayaran komoditas. Pesawat tempur Sukhoi SU-35 diprediksi akan mengudara di langit Indonesia pada tahun 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sebuah konferensi pers di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017). “Kurang lebih dua tahun setelah tanda tangan kontrak (dengan pihak Rusia),” ujar Ryamizard. Bila nanti Sukhoi SU-35 mengudara di langit Khatulistiwa, kata Ryamizard, Indonesia menjadi negara kedua pengguna pesawat tempur canggih tersebut setelah negara produsennya, Rusia.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Agregasi Sindonews.com, *Mantap! Tahun 2019, Sukhoi SU-35 Akan Mengudara Di Langit Indonesia*, <https://news.okezone.com/read/2017/08/22/337/1760696/mantap-tahun-2019-sukhoi-su-35-akan-mengudara-di-langit-indonesia> diakses pada 18 Agustus 2018.